

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Persepsi dan Sikap

1. Persepsi

Persepsi berhubungan dengan kemampuan berinteraksi manusia terhadap lingkungannya akan aktifitas - aktifitas kejiwaan. Kemampuan tersebut adalah bagaimana manusia menerima stimulus dari luar yang berhubungan dengan aspek pengenalan (kognisi) dan kemampuan melahirkan apa yang terjadi dalam jiwa yang berhubungan dengan motif atau kemauan (kognasi).¹ Bigot menambahkan kemampuan kognasi sebagai respon atas kemampuan manusia dalam melihat efek atau stimulus yang menimbulkan *state*, atau keadaan - keadaan dalam jiwa manusia yang senang apabila melihat sesuatu yang indah atau positif.² Keterkaitan antara individu dengan lingkungannya, baik fisik maupun sosial memunculkan ragam respon dari stimulus-stimulus yang ditimbulkan, dan ini berkaitan erat dengan persepsi.

Pengertian Persepsi

Menurut kamus Bahasa Indonesia,³ persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui

¹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi, 2002), 67.

² *Ibid*, 68.

³ WJS. Purwadarmita, *Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 304.

panca inderanya. Proses penginderaan ini merupakan awal dari diterimanya stimulus oleh individu maupun kelompok melalui panca inderanya.⁴ Proses pengolahan stimulus ini merupakan proses dari persepsi yang berakhir dengan sikap.

Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi atas rangsangan panca indera atau data pada sebuah objek.⁵

Philip Kotler,⁶ memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan – masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti. Persepsi di sini tidak hanya tergantung pada hal fisik tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut.

Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan⁷. Hal tersebut didukung oleh pernyataan bahwa persepsi merupakan hasil akhir dari informasi yang ditangkap individu atas dasar sensasi dan memori yang berasal dari lingkungan dan ditangkap oleh suatu individu. Suatu rangsang dipandang

⁴ Walgito, *Pengantar*, 69.

⁵ Uday Pareek, *Prilaku organisasi, Pedoman ke Arah Pemahaman Proses Komunikasi Antar Pribadi dan Motivasi Kerja* (Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo, 1991), 13.

⁶ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*, Edisi Kelima (Jakarta ; Erlangga, 1997), 164.

⁷ Joyce Marcella Laurens, *Arsitektur dan Perilaku Manusia* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 56.

sebagai kejadian-kejadian yang ada dalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap oleh dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk ke dalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf (misal otak) maka sensasi ini akan dioleh, proses pengolahan sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi.⁸

Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat adanya persamaan bahwa persepsi ditimbulkan oleh adanya rangsangan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan yang diproses di dalam susunan saraf dan otak (didalam tubuh penerima rangsangan). Sukmana menjelaskan, persepsi timbul selain dari akibat rangsangan dari lingkungan, persepsi juga lebih merupakan proses yang terjadi pada struktur fisiologis dalam otak⁹. Penangkapan tersebut biasanya dalam bentuk sensasi dan memori atau pengalaman di masa lalu.

Faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi di mana persepsi

⁸ Oman Sukmana, *Dasar-dasar Psikologi Lingkungan* (Malang: UMM Press, 2003), 52.

⁹ *Ibid* , 52.

tersebut dibuat.¹⁰ Asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dan persepsi-persepsi yang dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dikemukakan oleh sekelompok peneliti yang berasal dari Universitas Princeton. Mereka mengemukakan konsep yang disebut dengan pandangan transaksional (*transactional view*). Konsep ini pada dasarnya menjelaskan bahwa pengamat dan dunia sekitar merupakan partisipan aktif dalam tindakan persepsi. Para pemikir transaksional telah mengembangkan sejumlah bukti yang meyakinkan bahwa persepsi didasarkan pada asumsi.

Gifford dalam Ariyanti¹¹ juga menyebutkan bahwa persepsi manusia dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. *Personal Effect*

Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing

¹⁰ Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi Buku 1*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 174-184.

¹¹ Elisa Ariyanti, "Pengembangan Pemanfaatan Polder Kota Lama Semarang Sebagai Ruang Publik Yang Rekreatif Berdasarkan Persepsi Masyarakat Dan Pemerintah". Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, 2005

individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar.

Proses pengalaman atau pengenalan individu terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi, pada umumnya mempunyai orientasi pada kondisi lingkungan lain yang telah dikenal sebelumnya dan secara otomatis akan menghasilkan proses perbandingan yang menjadi dasar persepsi yang dihasilkan. Pembahasan terhadap hal-hal yang berpengaruh sebagai latar belakang terbentuknya persepsi akan mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.

b. *Cultural Effect*

Gifford memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam “melihat dunia”. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

c. *Physical Effect*

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya, ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet, dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di bagian depannya.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa persepsi selain terjadi akibat rangsangan dari lingkungan eksternal yang ditangkap oleh suatu individu, juga dipengaruhi oleh kemampuan individu tersebut dalam menangkap dan menterjemahkan rangsangan tersebut menjadi suatu informasi yang tersimpan menjadi sensasi dan memori atau pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, persepsi yang terbentuk pada masing-masing individu dapat berbeda-beda.

Selanjutnya menurut Laurens, dikemukakan bahwa persepsi sangat diperlukan oleh perencana dalam menentukan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat baik secara personal maupun sebagai kelompok pengguna. Sebagian besar arsitektur

dibentuk oleh persepsi manusia.¹² Oleh karena itu, dalam menciptakan karya-karya arsitektur faktor persepsi sebagai salah satu bentuk respon yang keluar secara personal setelah menangkap, merasakan dan mengalami karya-karya tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting.

Respon tersebut mencerminkan sesuatu yang diinginkan oleh individu pengguna dan penikmat hasil karya yang ada. Respon yang keluar berdasarkan pengalaman ruangnya, pengetahuan akan bentuk dan simbolisasi yang didapat dari pendidikannya¹³. Istilah yang digunakan oleh Laurens bagi pengalaman ruang, pengetahuan akan bentuk dan simbolisasi adalah peta mental (*mental image*), dan sekali lagi menurut Laurens bahwa peta mental tersebut akan berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lain.

Beberapa pendapat dari ahli yang dirangkum oleh Laurens menyebutkan beberapa faktor yang membedakan peta mental seseorang adalah sebagai berikut:

a. Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang menyebabkan timbulnya selektivitas dan distorsi peta mental.¹⁴ Hal tersebut erat kaitannya dengan tempat (jenis, kondisi, jumlah, dan lain

¹² Laurens, *Arsitektur*, 55.

¹³ *Ibid*, 92.

¹⁴ *Ibid*, 92.

sebagainya) yang pernah dikunjungi sesuai dengan gaya hidup yang dimiliki.

b. Keakraban dengan lingkungan

Hal ini menyangkut pada seberapa baik seseorang mengenal lingkungannya. Semakin kuat seseorang mengenal lingkungannya, semakin luas dan rinci peta mentalnya.

c. Keakraban sosial

Semakin luas pergaulannya, semakin luas wilayah yang dikunjungi, dan semakin ia tahu akan kondisi wilayah tertentu maka semakin baik peta mentalnya.

d. Kelas sosial

Semakin terbatas kemampuan seseorang, semakin terbatas pula daya geraknya dan semakin sempit peta mentalnya.

e. Perbedaan Seksual

Laki-laki biasanya mempunyai peta mental yang lebih baik dan terinci daripada perempuan karena kesempatan pergaulan dan ruang geraknya juga lebih luas. Terlebih lagi, dalam kondisi masyarakat yang ada pada umumnya akan lebih memberi peluang kepada kaum pria untuk bergerak dengan berbagai aktivitas.

Hal-hal inilah yang akan memberi pengertian bagaimana menciptakan bangunan atau lingkungan yang mudah dilihat dan diingat, sekaligus membangkitkan kekayaan pengalaman orang yang memakainya terutama pada fasilitas public.¹⁵ Berdasarkan dari hal tersebut, maka dalam penelitian disertakan persepsi masyarakat sekitar, dalam hal ini adalah masyarakat santri yang tinggal dan beraktifitas di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji.

Pemilihan jenis masyarakat tersebut dikarenakan bahwa dengan tinggal ataupun beraktifitas di lingkungan atau objek penelitian dapat diartikan bahwa mereka mengenal kondisi lingkungannya. Selain itu berdasarkan dari faktor yang membedakan peta mental seseorang, perlu juga diketahui karakteristik masyarakat tersebut yang meliputi jenis kelamin, tingkat pendidikan, mata pencaharian untuk mengetahui aktivitas utama sehari-hari dan tingkat pendapatan. Pengambilan karakteristik masyarakat berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, mata pencaharian untuk mengetahui aktivitas utama sehari-hari dan tingkat pendapatan tersebut merupakan pendekatan terhadap kemungkinan terbentuknya persepsi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah diungkapkan di atas.

¹⁵ *Ibid*, 93.

Proses terjadinya persepsi

Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek dan reaksi terhadap rangsangan.¹⁶ Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera atau reseptor terhadap objek persepsi.

Ada dua jenis proses persepsi,¹⁷ yaitu :

a. Proses fisik (kealaman)

Proses persepsi dimulai dari pengindraan yang menimbulkan stimulus pada reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada syaraf sensoris otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis.

b. Proses psikologis

Proses pengolahan data pada syaraf sensoris otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba.

Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang menjadi perhatian untuk dipersepsikan. Di samping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas persepsi dari reseptor. Pada akhirnya,

¹⁶ Pareek, *Perilaku*, 14.

¹⁷ Walgito, *Pengantar*, 102.

persepsi masyarakat santri terhadap bank syariah ditentukan oleh tingkat pemahaman dan faktor internal maupun eksternalnya (lingkungan) yang diolah secara berbeda oleh masing-masing reseptor baik secara behavioristik maupun mekanistik.¹⁸

2. Sikap

Studi tentang sikap dalam perspektif psikologi sosial merupakan hal yang paling alami dan diperlukan sikap kehati-hatian. Sikap mengambil bagian yang penting di dalam kehidupan sosial, karena kehidupan manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Di sini, sikap terhadap suatu obyek, isue atau seseorang pada dasarnya merupakan perasaan suka atau tidak suka, tertarik atau tidak, percaya atau tidak, dan seterusnya. Kita juga berasumsi bahwa perasaan itu dapat direfleksikan dalam bentuk pernyataan yang dibuatnya, cara seseorang melakukan tindakan terhadap obyek sikap, dan reaksinya terhadap ekspresi opini dari orang lain. Dengan kata lain sikap memiliki keterkaitan dengan perasaan di satu sisi dan perilaku di sisi lain.

Dalam hidupnya manusia mempunyai sikap untuk menentukan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dalam perspektif psikologi social yang menyangkut pada proses pembentukan dan perubahannya, sikap telah banyak mengalami modifikasi dan reinterpretasi terhadap

¹⁸ *Ibid*, 104.

konstruksi prinsip-prinsip maupun hipotesis-hipotesisnya.¹⁹ Hal ini disebabkan oleh banyaknya kajian akan perilaku individual maupun kelompok yang dipengaruhi oleh sikap. Di samping itu, banyaknya teori dan kajian akan objek ini menjadikan konsepsi sikap mengalami perubahan dan perkembangan.

Dijelaskan Walgito²⁰, bahwa sikap, tingkah laku, atau perbuatan manusia merupakan hal penting dalam kehidupan psikologis manusia. Sikap merupakan organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif *ajeg*, disertai oleh adanya suatu perasaan tertentu, yang pada akhirnya memberikan dasar kepada orang tersebut untuk membuat respon atau perilaku dalam cara yang tertentu yang dipilihnya. Sikap yang ada pada diri manusia akan memberikan corak pada tingkah laku atau perbuatan manusia tersebut. Penerimaan atau penolakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menanggapi suatu masalah dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya. Dengan mengetahui sikap seseorang maka akan dapat diprediksikan suatu reaksi atau tindakan yang akan diambil oleh orang tersebut.

Menurut Gerungan²¹, manusia tidak dilahirkan dengan sikap-sikap tertentu, akan tetapi sikap tersebut dibentuk oleh seorang individu sepanjang perkembangan hidupnya. Sikap inilah yang

¹⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 233.

²⁰ Walgito, *Pengantar*, 109.

²¹ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), 149.

berperan besar dalam kehidupan manusia karena sikap yang telah terbentuk dalam diri manusia turut menentukan cara-cara manusia itu memunculkan tingkah laku terhadap suatu obyek. Atau dengan kata lain sikap menyebabkan manusia bertindak secara khas terhadap obyeknya.

2.1 Pengertian sikap

Sikap dapat didefinisikan sebagai kesediaan bereaksi atau diarahkan terhadap suatu objek.²² Objek sikap ini dapat berupa peristiwa-peristiwa, lembaga-lembaga dan norma maupun nilai yang ada dalam masyarakat. Pada sikap sosial, reaksi terhadap stimulus akan objek sikap dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat dinamis yang membentuk kekhasan perilaku individu maupun kelompok. Sikap memiliki kesamaan dengan motif dan motivasi sebagai faktor penggerak pribadi maupun kelompok dalam bertindak.

Mar'at mengungkapkan²³, bahwa sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktifitas, akan tetapi berupa pre-disposisi tingkah laku. Sikap merupakan kesiapan individu untuk bereaksi terhadap obyek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek tersebut.

Pada saat individu berkembang, maka kognisi-kognisinya, perasaan-perasaannya, dan tendensi-tendensi

²² *Ibid*, 149.

²³ Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukuran* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 12.

tingkah lakunya berkenaan dengan bermacam ragam obyek di dunianya terorganisasikan menjadi sistem-sistem yang tahan lama, dan inilah yang dinamakan sikap²⁴.

Menurut Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial²⁵, sikap merupakan masalah yang lebih banyak bersifat afektif. Sikap menunjukkan penilaian kita (baik positif maupun negatif) terhadap bermacam-macam entitas, misalnya: individu-individu, kelompok-kelompok, obyek-obyek, maupun lembaga-lembaga. Secara umum, sikap seseorang dianggap mempunyai perilakunya, namun hubungan antara keduanya sangat lemah karena pada kenyataannya acap kali perilaku seseorang tergantung pada faktor-faktor situasional yang mempengaruhi pilihan yang diambil seseorang.

Sedangkan sikap menurut Atkinson²⁶, sangat terkait dengan kognisi—khususnya, dengan keyakinan tentang sifat suatu obyek. Sikap juga berkaitan dengan tindakan yang kita ambil karena sifat obyek tersebut. Sikap meliputi rasa suka dan tidak suka; mendekati atau menghindari situasi, benda, orang, kelompok; dan aspek lingkungan yang dapat dikenal lainnya, termasuk gagasan abstrak dan kebijakan sosial.

Keseluruhan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan kesimpulan atau kecenderungan

²⁴ David Krech dkk, *Psikologi Sosial* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1982), 25.

²⁵ Ensiklopedi Ilmu Sosial (2005), 49.

²⁶ R.L Atkinson dkk, *Pengantar Psikologi Jilid I*, (Jakarta : Erlangga, 1999), 371.

individu untuk bertindak terhadap obyek tertentu dengan didasari oleh pandangan, perasaan dan keyakinannya. Hal inilah yang menyebabkan sikap orang terhadap sesuatu hal berbeda satu dengan yang lainnya meskipun menghadapi obyek yang sama.

2.2 Komponen-komponen sikap

Sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang²⁷, yaitu :

1) Komponen kognitif

Komponen kognitif merupakan kepercayaan seseorang mengenai apa yang benar atau berlaku bagi obyek sikap. Komponen ini merupakan representasi dari apa yang dipercayai dan diyakini (*belief*) oleh individu. Komponen kognitif dalam sikap terhadap bank syariah adalah apa yang dipercaya seseorang mengenai keberadaan bank tersebut. Berdasarkan apa yang telah kita lihat atau apa yang telah kita ketahui kemudian terbentuklah suatu ide atau gagasan mengenai sifat atau karakteristik umum tentang bank syariah.

Mann (1969), menjelaskan bahwa komponen kognitif berisikan tentang persepsi, kepercayaan, dan *stereotype*

²⁷ Syaifuddin Azwar , *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 17.

yang dimiliki individu mengenai sesuatu.²⁸ Yang menjadi determinan utama dalam sikap adalah pengalaman pribadi, apa yang diceritakan oleh orang lain, dan kebutuhan emosional individu tersebut. Akan tetapi pola stereotype akan berpengaruh pada subjektifitas sikap. Hal ini disebabkan oleh pengalaman pribadi yang digeneralisasikan yang kemudian berakar dalam diri individu. Pemaknaan ini menyebabkan banyak orang mempersamakan sikap kognitif ini dengan pandangan (opini), terutama berhubungan dengan hal-hal yang kontroversial dimasyarakat.

Aspek kognitif menjadi elemen penting dalam sikap dikarenakan dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu dibentuk dari kepercayaan yang datang pertama kali. Akan tetapi ada kalanya komponen ini tidak akurat. Hal ini disebabkan oleh kurang atau ketiadaan informasi yang memadai dan benar mengenai objek yang dihadapi. Dengan demikian, keteraturan dan arti sikap dibentuk dari interaksi seseorang baik di masa lalu maupun harapan kondisi di masa datang.

2) Komponen afeksi

Komponen afeksi merupakan komponen individu terhadap obyek sikap dan perasaan yang mengandung

²⁸ *Ibid*, 24.

masalah emosional yang biasa disebut niatan. Komponen afeksi merupakan pengertian perasaan yang mengandung masalah emosional. Pengertian perasaan seorang individu sering diartikan berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. Umumnya reaksi emosional ini ditentukan oleh kepercayaan atau apa yang kita percaya sebagai sesuatu yang mempunyai arti benar bagi obyek sikap tersebut.

Setiap orang mempunyai alasan yang berbeda-beda tentang mengapa mereka bersikap ataupun tidak bersikap, khususnya terhadap hubungan seksual secara bebas. Apabila seorang individu percaya bahwa dengan berhubungan seksual secara bebas dapat menimbulkan banyak masalah dan kerugian bagi individu yang menjalani maka seorang individu itu akan mempunyai perasaan yang negatif terhadap hubungan seksual secara bebas, hal ini bisa dilakukan dengan terbentuknya perasaan tidak suka atau senang tidak senang.²⁹

Dari ketiga komponen sikap ini, komponen afeksi merupakan komponen sikap yang paling bertahan terhadap pengaruh yang mungkin dapat merubah seseorang. Hal ini

²⁹ Mar'at , *Sikap Manusia*, 21.

karena aspek emosional ini bisa berakar paling dalam sebagai komponen sikap.

3) Komponen konatif

Komponen konatif sering pula disebut dengan komponen perilaku. Komponen ini menunjukkan bagaimana kecenderungan untuk melakukan sesuatu dalam diri seorang individu dan sangat berkaitan dengan obyek sikap yang mengenainya. Dalam kaitan ini, diasumsikan bahwa perilaku dipengaruhi oleh perasaan maupun kepercayaan individu. Kecenderungan berperilaku ini secara konsisten akan selaras dengan perasaan dan kepercayaan yang kemudian membentuk sikap individu.

Untuk itu, menjadi hal yang wajar ketika perilaku individu maupun sebuah masyarakat terhadap bank syariah bisa menerima ataupun menolak. Hal ini merupakan cermin dari bentuk tendensi perilaku akan sebuah objek sikap.

Krech dan kawan-kawan,³⁰ mengungkapkan bahwa sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- 1) Komponen kognitif yang mencakup keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan seorang individu tentang sasaran sikap individu tersebut. Keyakinan-keyakinan yang ada pada komponen kognitif kebanyakan adalah keyakinan

³⁰ Krech, *Psikologi*, 25 - 26.

keyakinan evaluatif yang menyangkut atribusi kualitas-kualitas, seperti ,’’baik’’ atau ’’buruk‘’, ’’dikehendaki‘‘ atau ’’tidak dikehendaki‘‘, ’’favorable‘‘ atau ’’unfavorable‘‘.

- 2) Komponen perasaan ditunjukkan kepada emosi-emosi yang berkaitan dengan sasaran sikap, seperti senang atau tidak senang, suka ataupun tidak suka. Muatan emosi ini kemudian menyebabkan sikap mempunyai daya dorong.
- 3) Komponen tendensi tingkah laku, mencakup pada semua bentuk kesiapan untuk bertindak yang ada hubungannya dengan sikap itu sendiri. Seseorang yang bersikap positif terhadap suatu gerakan, dalam hal ini seperti, cenderung mendukung, menjadi nasabah bank syariah atau menolak dan tidak menjadi nasabah bank syariah.

Menurut Mar’at³¹, sikap memiliki tiga komponen, yaitu :

- 1) Komponen kognisi yang hubungannya dengan *belief*, ide, dan konsep;
- 2) Komponen afeksi yang menyangkut kehidupan emosional seseorang;
- 3) Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Untuk menjelaskan konteks sikap, Mar’at mengungkapkan bahwa, sikap merupakan kumpulan dari

³¹ Mar’at, *Sikap Manusia*, 13.

berpikir, keyakinan, dan pengetahuan sekaligus memiliki evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional karena disebabkan oleh komponen afeksi yang hubungannya dengan obyek sikap. Obyek yang dihadapi oleh seorang individu terlebih dahulu berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran individu tersebut. Sehingga komponen kognisi melukiskan obyek tersebut, dan sekaligus dikaitkan dengan obyek-obyek lain disekitarnya (adanya penalaran pada diri seseorang terhadap obyek mengenai karakteristiknya) yang akibat dari gambaran ini akan menghasilkan suatu keyakinan atau penilaian sehingga terjadilah kecenderungan untuk bertingkah laku.

Sedangkan Atkinson³², mengkaji sikap sebagai komponen dari sistem yang terdiri dari tiga bagian. Keyakinan mencerminkan komponen kognitif; sikap merupakan komponen afektif; dan tindakan mencerminkan komponen perilaku.

Dari berbagai pendapat tentang komponen-komponen sikap di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen kognitif yang berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar, komponen afektif merupakan niatan atau perasaan

³² Atkinson, *Pengantar*, 371-372.

individu terhadap objek sikap dan perasaan yang mengandung masalah emosional, komponen konatif atau komponen perilaku yang menunjukkan bagaimana kecenderungan perilaku yang ada dalam diri seseorang.

2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

Faktor-faktor sikap menurut Middlebrook dalam Azwar³³, adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor-faktor emosi dalam individu.

1) Pengalaman pribadi

Kesan yang kuat dapat menjadi dasar pembuatan sikap pengalaman pada diri individu. Oleh karena itu sikap akan lebih mudah terbentuk apabila faktor emosional terlibat dalam pengalaman tersebut. Namun pengalaman tunggal jarang sekali menjadi dasar pembentukan sikap. Pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama membekas jika situasinya sangat melibatkan emosi dan benar-benar dihayati oleh diri individu yang bersangkutan.

2) Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan yang ada dimana seseorang itu tinggal dan dibesarkan memiliki arti yang mendalam pada

³³ Azwar, *Sikap*, 30-38.

pembentukan sikap orang tersebut. Di sadari atau tidak kebudayaan telah menanamkan arah sikap seseorang terhadap berbagai masalah yang sedang dihadapinya.

3) Pengaruh orang yang dianggap penting

Orang lain yang hidup dan berada di sekitar kita merupakan bagian dari komponen sosial yang sedikit banyak dapat mempengaruhi sikap individu dalam bersikap. Pada masyarakat Indonesia cenderung lebih mempunyai sikap yang searah atau konformis kepada orang yang di anggapnya penting. Kecenderungan seperti ini lebih dipengaruhi oleh motivasi berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting oleh individu tersebut.

4) Media massa

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti : televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Media massa membawa perilaku pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengartikan opini individu. Adanya informasi baru mengenai suatu hal akan memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugesti yang dibawa oleh informasi yang cukup kuat akan memberikan

dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuknya arah sikap tertentu.

5) Tingkat pendidikan

Prestasi belajar yang didapatkan oleh seorang individu bisa digunakan untuk mengetahui taraf kemampuannya, dari individu tersebut masuk sekolah hingga tingkat pendidikan terakhir yang dia capai. Dengan pendidikan memungkinkan seseorang mendapatkan pengalaman, pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis mengenai obyek sikap yang mengenai individu tersebut.

6) Pengaruh emosional

Emosi berfungsi sebagai penyaluran dan pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego

7) Pengaruh tokoh agama

Tokoh agama memiliki peran dalam perubahan sikap suatu masyarakat tertentu. Pengaruh ini didasarkan pada kondisi budaya tempat masyarakat tersebut bertempat tinggal.

Pendapat lain di kemukakan oleh Walgito³⁴, bahwa sikap dipengaruhi oleh :

1) Faktor internal

³⁴ Walgito, *Psikologi*, 115-116.

Faktor internal di sini terdiri dari faktor biologis dan psikologis. Ini berarti bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai sikap yang berbeda secara fisiologis dan psikologisnya.

2) Faktor eksternal

Terdiri dari pengalaman, situasi, norma-norma, hambatan, dan pendorong. Faktor eksternal ini dapat berwujud situasi yang dihadapi oleh individu serta norma-norma yang ada di masyarakat. Keseluruhan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sikap dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu faktor fisiologis dan psikologis, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pengalaman, situasi, norma-norma, hambatan, dan pendorong yang mempengaruhi bagaimana sikap masyarakat santri terhadap bank syariah.

2.4 Proses Terjadinya Sikap

Sikap terbentuk dari tiga struktur sikap yang mempengaruhi pertimbangan atau pengolahan persepsi individu terhadap suatu objek yang ditunjukkan dalam perilaku. Sikap sosial suatu masyarakat terbentuk dari interaksi individu, dimana masing – masing saling mempengaruhi dan terjadi

hubungan timbal balik yang bisa mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota masyarakat.³⁵

2.5 Proses perubahan Sikap

Menurut Gerungan,³⁶ perubahan sikap tidak terjadi tanpa dasar yang jelas. Perubahan sikap berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan obyek tertentu. Interaksi sosial yang terjadi di dalam dan di luar kelompok dapat mengubah sikap bahkan dapat membentuk sikap baru. Faktor-faktor lain yang turut memegang peranannya ialah faktor-faktor intern di dalam diri manusia, yaitu selektivitas sendiri, daya pilihannya sendiri, atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya.

Faktor-faktor internal sendiri masih ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, yaitu motif-motif dan sikap lainnya yang sudah terdapat dalam diri pribadi itu. Mengenai faktor eksternal dalam perubahan sikap, M Sherif dalam Gerungan,³⁷ mengemukakan bahwa sikap dapat dibentuk dan diubah. Perubahan sikap dapat berlangsung dalam interaksi kelompok, dimana terdapat hubungan timbal balik yang langsung antar manusia.

3. Hubungan antara persepsi dan sikap

Sikap merupakan suatu evaluasi positif atau negatif terhadap objek atau permasalahan tertentu yang berhubungan dengan

³⁵ Azwar, *Sikap*, 30.

³⁶ Gerungan, *Psikologi*, 154-157

³⁷ *Ibid*, 156

lingkungan. Sikap ini dipengaruhi oleh persepsi dan kognisi lingkungan, akan tetapi sikap terhadap lingkungan ini mampu pula mempengaruhi persepsi dan kognisi lingkungan.

Predisposisi untuk bertindak positif atau negatif terhadap objek tertentu (sikap) mencakup komponen kognisi, afeksi, dan konasi. Komponen kognisi akan menjawab apa yang dipikirkan atau dipersepsikan tentang objek. Komponen afeksi menjawab pertanyaan tentang apa yang dirasakan (positif/negative) terhadap objek. Dan komponen konasi akan menjawab pertanyaan bagaimana kesediaan/kesiapan untuk bertindak terhadap objek. Selanjutnya bahwa ketiga komponen itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi menunjukkan bahwa manusia merupakan suatu sistem kognitif. Hal ini berarti bahwa yang dipikirkan seseorang tidak akan terlepas dari perasaannya. Masing-masing komponen tidak dapat berdiri sendiri, namun merupakan interaksi dari ketiga komponen tersebut secara kompleks.

Aspek kognisi merupakan aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima menentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat. Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi, yang banyak dipengaruhi oleh faktor personal individu (seperti minat, kepentingan, pengetahuan, kebiasaan mengamati, dan pengalaman), faktor sosial dan budaya, dan factor lingkungan fisik. Melalui komponen kognisi akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan

norma yang dimiliki pribadi seseorang, akan terjadi keyakinan terhadap objek tersebut.

B. Kajian Umum tentang Masyarakat Santri

Masyarakat santri merupakan salah satu pilar penting dalam perkembangan agama Islam di Indonesia. Kepercayaan, nilai dan perilaku pesantren turut mempengaruhi masyarakat di luar pesantren. Pola hubungan ini menjadikan dunia pesantren menjadi alternatif ideal bagi perubahan di masyarakat.³⁸ Pengaruh masyarakat santri terhadap masyarakat Indonesia masih kuat, baik dalam peran pesantren sebagai pusat tarekat³⁹ maupun pendidikan anak-anak.

Memahami masyarakat santri tidak bisa dilepaskan dari konstruksi bangunan sebuah pesantren yang memiliki karakteristik unik. Lembaga ini di samping sebagai media transmisi ajaran Islam tradisional⁴⁰ juga merupakan miniatur tatanan masyarakat dengan heterogenitas pelaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat yang mendasarkan diri pada ajaran agama sebagai dasar dalam berperilaku sehari-hari. Aktifitas keagamaan yang dilaksanakan dalam lingkungan ini senantiasa menciptakan pribadi-pribadi santri yang menjunjung tinggi moralitas dan pemahaman terhadap ilmu agama. Kondisi tersebut selanjutnya berpengaruh pada masyarakat sekitar pesantren juga tempat berdakwah santri pasca menyelesaikan proses belajar di dalam pesantren.

³⁸ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi : Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS 2001), 2-3.

³⁹ Julia Day Howell, Sufism and the Indonesian Islamic Revival (*The Journal of Asian Studies*, Vol. 60, No. 3 (Aug.), 2001), 33, 50, 701-729.

⁴⁰ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 17.

Dalam kurun waktu cukup lama, di Jawa sudah berkembang tradisi besar Islam. Tradisi ini lahir sebagai hasil strategi para penyebar Islam awal dalam mensikapi proses akulturasi dengan budaya masyarakat lokal. Tradisi besar yang kemudian dikenal dengan istilah “ tradisi pesantren ” itu menjadi babak baru dalam sejarah Jawa karena berhasil menjadi budaya tandingan bagi masyarakat pedalaman, Hindu-Jawa yang digawangi kalangan istana dan keraton Jawa. Dengan lahirnya budaya tandingan yang berkembang di pedesaan, maka Islam Jawa bukan lagi tampil sebagai subkultur, tetapi telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah tradisi besar (*great tradition*).⁴¹

Pesantren sebagai bagian intrinsik dari mayoritas muslim Indonesia dapat ditelusuri dari aspek historis pesantren yang keberadaannya relatif cukup lama. Penelitian tentang pesantren menyebutkan, pesantren sudah hadir di bumi nusantara seiring dengan penyebaran Islam di bumi pertiwi ini. Ada yang menyebutkan, pesantren sudah muncul sejak abad akhir abad ke-14 atau awal ke-15, didirikan pertama kali oleh Maulana Malik Ibrahim yang kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Sunan Ampel.⁴² Namun berdasarkan data yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, pesantren dalam pengertiannya yang sesungguhnya tumbuh-kembang sejak akhir abad ke-18. Dalam hal ini, Tegalsari dianggap sebagai pesantren tertua.⁴³

⁴¹ Joko Suryo, *Tradisi Santri dalam Historiografi Jawa: Pengaruh Islam di Pesisir Utara Jawa dalam Dari Samudra Pasai ke Yogyakarta*, ed.Sunaryo Purwo Sumitro (Jakarta: Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia, 2002), 15.

⁴² Marwan Saridjo et. al., *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), 22.

⁴³ Martin van Bruinessen, “‘Traditionalist’ and ‘Islamist’ Pesantren in Contemporary Indonesia” Makalah pada workshop tentang Madrasah di Asia, ISIM, 23-24 Mei 2004.

Pada era industrialisasi sebagai realitas objektif yang dihadapi masyarakat pesantren, merupakan peluang sekaligus tantangan. Perkembangan dunia keuangan, lebih spesifik dunia perbankan, masyarakat santri memainkan peran strategis terutama yang berhubungan dengan perbankan syariah. Motif ekonomi dan pemberdayaan masyarakat adil yang makmur memunculkan dialektika khas dari komunitas ini. Di sisi lain, pranata dan tradisi masyarakat pesantren juga ditantang seberapa jauh mempunyai kepekaan terhadap realitas jaman sehingga tetap dalam watak populisnya.

1. Pengertian Pesantren

Pesantren adalah sebuah institusi pendidikan keagamaan tertua yang tumbuh dan berkembang secara swadaya dalam masyarakat muslim Indonesia. Lembaga pendidikan yang khas Indonesia (*indigenous*) ini bisa dilacak sejak awal kehadiran dan da'wah Islam di Indonesia⁴⁴. Penyiaran Islam khususnya di Jawa relatif tidak menimbulkan problem konfliktual karena proses akulturasi, akomodasi, dan transformasi terhadap lembaga semisal yang telah eksis sebelumnya yang dimainkan oleh agama Hindu Budha⁴⁵.

Belajar dari konteks sejarah, masyarakat pesantren adalah masyarakat yang sejak awal telah mengambil jarak dengan pemerintah bahkan bersifat oposan, terutama pada era kolonialisme

⁴⁴ Hasan Muarif Ambari, *Menemukan Peradaban; Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), 319.

⁴⁵ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), 145.

Belanda. Karena itu pesantren sejak awal telah mempunyai potensi kemandirian dan kepengusahaan (*entrepreneurship*)⁴⁶.

Masyarakat pesantren sebagai *sub culture* mempunyai etos atau karakteristik budaya yang berbeda dengan masyarakat lain. Etos tersebut merupakan aplikasi dari seperangkat nilai yang dijabarkan dari konsep ketaqwaan, yaitu sikap puritan, keikhlasan, kebersamaan (*ukhuwwah*), kemandirian, kesederhanaan, hemat, kesediaan menunda kesenangan sesaat demi peningkatan prestasi dan sebagainya yang bernilai positif bagi pemberdayaan ekonomi. Terlepas dari gambaran ideal di atas, sebagian besar masyarakat pesantren era kontemporer ini di pentas perekonomian tetap saja menempati posisi marginal sub ordinat yang menjadi objek aktivitas ekonomi “kaum kapitalis” yang kadang keluar dari nilai keislaman dan menjadi penyedia tenaga buruh (*labour*).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama tempat santri atau siswa-siswa belajar mengaji. Sedangkan secara istilah, pesantren diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam di mana santri biasa tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum bertujuan menguasai pengetahuan agama Islam secara detail serta mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian

⁴⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1994), 223.

dengan menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁷

Pendapat lain yang mendukung pengertian pesantren adalah pendapat dari Clifford Geertz yang mengartikan pesantren sebagai pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup dalam keseharian.⁴⁸

Dalam konteks ini, pesantren dapat diartikan sebagai tempat di mana santri tinggal.⁴⁹ Sedang Abdurrahman Mas'ud, mendefinisikan pesantren *refers to a place where the santri devotes most of his or her time to live in and acquire knowledge.*⁵⁰ Definisi di atas menunjukkan betapa pentingnya sosok pesantren sebagai sebuah totalitas lingkungan pendidikan dalam makna dan nuansanya secara menyeluruh. Secara definitif Imam Zarkasyi, mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kiyai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwoinya, dan pengajaran

⁴⁷ Abu Hamid, *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*, dalam Taufiq Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial* (Jakarta ; Rajawali Press, 1993), 329.

⁴⁸ Dalam penelitian Clifford Geertz, kata santri mempunyai pengertian secara luas dan sempit. Dalam arti sempit santri adalah satu murid dalam sekolah agama yang disebut pondok atau pesantren. Oleh karena itu, istilah pondok pesantren diambil dari perkataan santri yang berarti tempat untuk santri. Dalam arti luas dan umum, santri adalah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam secara benar – benar, bersembahyang, pergi masjid dan berbagai aktifitas lainnya. Lihat Clifford Geertz, *Abangan Santri; Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, diterjemahkan oleh Aswab Mahasun (Cet. II; Jakarta ; Dunia Pustaka Jaya, 1983), 268, dikutip oleh Yasma, *Modernisasi Pesantren : Kritik Nur Cholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta : Quantum Teaching, 2005), 61.

⁴⁹ Wahid, *Menggerakkan*, 17.

⁵⁰ Ismail SM (ed), *Pendidikan Islam , Demokrasi dan Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 171.

agama Islam di bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya⁵¹. Secara singkat pesantren bisa juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.

Istilah dan aktifitas tentang pesantren juga sering dipersamakan dengan pondok. Namun ada yang menggabungkan dua istilah tersebut menjadi pondok pesantren. Pondok dapat diartikan sebagai tempat menginap atau penampungan bagi santri yang belajar pada seorang kyai atau di lembaga pendidikan pesantren yang tempat tinggalnya jauh.⁵² Istilah tentang pondok pesantren akhir – akhir ini mengalami penggabungan. Hal ini disebabkan oleh keduanya yang merupakan dua hal berbeda istilah tetapi menjadi satu bagian yang integral. Penggabungan ini dimaksudkan agar karakter keduanya terakomodasi dan memiliki karakteristik khas sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam di Jawa.

Menurut M. Arifin,⁵³ Pondok pesantren adalah ,

“ Suatu lembaga pendidikan Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan system asrama (komplek) di mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui system pengajian atau madrasah yang sepenuhnya di bawah kedaulatan *leadership* seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat krarismatik serta independen dalam segala hal.

⁵¹ Amir Hamzah Wirosukarto, *KH. Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren Modern* (Ponorogo: Gontor Press, 1996), 56.

⁵² Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren : Pendidikan Alternatif Masa depan* (Jakarta : Gema Insani Press, 2000) Cet. II, 70.

⁵³ M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)* (Jakarta ; Bumi Aksara, 1991), 240.

Pada perkembangannya pengertian pondok pesantren bersifat fleksibel. Hal ini didasarkan pada ragam pengertian pondok pesantren yang didasarkan pada ciri-ciri maupun unsur-unsurnya. Pengertian ini selalu berkembang seiring dengan dinamika yang terjadi di pondok pesantren itu sendiri. Pondok pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan yang bersifat tradisional, tetapi menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pengertian Santri dan Masyarakat Santri

Santri didefinisikan dari akar kata bahasa Sansekerta yang berarti sebagai orang yang *melek* huruf.⁵⁴ Zamarkasyi Dhofier berpendapat berbeda,⁵⁵ santri berarti orang-orang yang buku-buku suci agama Hindu, atau sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Pengertian ini diambil dari kata santri dari akar kata dari bahasa India. Pendapat lain menyebutkan bahwa, santri berasal dari bahasa Jawa yang berarti “ cantrik “, orang yang mengikuti seorang guru kemana guru itu pergi menetap.

Dalam perkembangannya, pesantren senantiasa melibatkan masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dari lembaga ini. Keterlibatan masyarakat memberikan *value added* dan dinamika tersendiri. Hal ini disebabkan oleh interaksi antara elemen-elemen pesantren telah mengakibatkan munculnya nilai – nilai yang tidak

⁵⁴ Nurcholis Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren : Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta : Paramadina, 1999) Cet. II, 19.

⁵⁵ Zamkhasyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Cet. II ; Jakarta; Mizan, 2002), 18.

hanya terjadi pada internal institusi pesantren itu sendiri tetapi juga terjadi di masyarakat sekitarnya.

Definisi masyarakat santri dikemukakan oleh Moh. Yahya,⁵⁶ sebagai masyarakat yang mengadopsi nilai-nilai positif pesantren. Nilai – nilai yang diajarkan di pesantren merupakan transformasi dan tauladan seorang kyai atau guru kepada santri atau murid dan masyarakat sekitarnya. Pemahaman keilmuan dan *uswah* yang diperoleh dipesantren juga diterapkan oleh para alumni ketika kembali ke masyarakatnya.

Dalam aplikasi pengetahuannya, banyak terlihat aktivitas masyarakat santri yang bersifat keagamaan atau ritual murni dan jarang sekali yang bernuansa pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari da'wah sosial. Hal tersebut di atas tidak terlepas dari pandangan teologis masyarakat pesantren. Banyak analisis menyatakan bahwa lemahnya etos kerja masyarakat muslim banyak disebabkan oleh pengaruh yang begitu dominan dari teologi fiqh yang hanya berorientasi keakhiratan dan aliran tashawuf yang mengambil jarak dengan hal-hal yang profan.

Dengan mengacu pada perspektif Muhammad Abid Al-Jabiriy, tradisi dan peradaban yang berkembang di masyarakat pesantren adalah tradisi dan peradaban fiqh⁵⁷. Tradisi tersebut sangat mewarnai pandangan dunia, moralitas dan persepsi ataupun

⁵⁶ Moh. Yahya, Refleksi Haul KH. Musthofa (Lamongan : Zidda Press, 2010), 9.

⁵⁷ Al Jabiry, *Takwin*, 56.

sikap masyarakat santri. Tradisi dimaknai sebagai sebuah kekayaan ilmiah dan metode berpikir yang diwariskan oleh *al-Qudama* (scholastik Islam).

Nalar fiqh, menurut al-Jabiriy, selama ini masih dominan mengabdikan pada epistem bahasa (*bayani*). Epistemologi ini pada akhirnya juga berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat santri. Begitu kuatnya hegemoni epistem bayani pada akhirnya melahirkan konservatisme dan paham-paham yang bersifat keagamaan murni, berorientasi regresif, dan membuat jarak terhadap pemikiran rasional.

Masyarakat santri selama ini dikenal sebagai agen ortodoksi, yaitu masyarakat yang orientasinya lebih diarahkan bagaimana menjaga kesinambungan keaslian tradisi dari tarikan akulturatif kepercayaan dan budaya asing yang terbingkai dalam alam modern, padahal rasionalisasi merupakan salah satu ciri tak terpisahkan dari masyarakat industri. Weber menyatakan bahwa cara berpikir rasional merupakan prasyarat dominan dalam masyarakat industri menggantikan cara berpikir berdasar nilai, perasaan, dan tradisi.⁵⁸

Dalam perspektif sosiologi, struktur kesadaran senantiasa diletakkan dalam konteks sosial yang spesifik. Dalam hingar bingarnya industrialisasi masyarakat pesantren memang sama

⁵⁸ Kuntowijoyo, *Identitas*, 41.

sekali tidak ada upaya adaptasi dan transformasi. Bagaimanapun masyarakat pesantren mempunyai kepentingan untuk merelevansikan dirinya dengan kondisi sosial agar tetap survive, meski upaya yang dilakukan hanya bersifat *surface*, defensif, dan kurang menyatu dengan struktur kesadaran keimanan terdalam⁵⁹.

Karena itu dibutuhkan upaya transformatif yang menyangkut dimensi secara menyeluruh (*holistic*), termasuk transformasi tata nilai, tingkah laku individu dan struktur kehidupan kolektif masyarakat pesantren, sehingga respon masyarakat pesantren terhadap industrialisasi bukan dengan menyusun proyek-proyek “dadakan” atau “tempelan” yang tidak sampai pada kesadaran terdalam. Diperlukan gerakan-gerakan penyadaran dan pemberdayaan (*empowerment*), seperti menciptakan kebersamaan di antara masyarakat sendiri dalam membicarakan dan mempersepsi realitas, mencari peluang, dan memutuskan secara kolektif bagaimana mengubah realitas itu agar lebih bermakna sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan kekhalifahan manusia untuk menciptakan kemakmuran dengan sama sekali tidak memutus akar tradisi.

Fiqh sebagai *the king of Islamic sciences* seharusnya dapat menjadi starting point untuk mempersepsi realitas secara dinamis dan kontekstual. Kenyataannya pandangan ke-fiqh-an masyarakat

⁵⁹ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 60.

santri masih membelenggu dengan pendekatan yang masih bersifat normatif. Fiqh lebih diposisikan sebagai alat legislasi, pemilah antara halal, haram, dan syubhat bagi praktek ekonomi yang datang “dari luar”. Fiqh tidak pernah dijadikan perangkat keilmuan yang mela-hirkan kreativitas ekonomi. Fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat ‘amali (praktis) banyak membahas perilaku ekonomi atau yang disebut dengan fiqh mu’amalah.

Khazanah tradisi ini, sayangnya, kurang mendapatkan apresiasi dan reaktualisasi yang kontekstual dari masyarakat santri. Fiqh sebagai refleksi logis sosial budaya era *tadwiyn* cenderung dianggap *divine* dan final, sementara kebanyakan bentuk dan subtansi lembaga-lembaga perekonomian modern seperti lembaga keuangan syariah beserta konsepnya bersifat baru yang tidak paralel dengan khazanah klasik.⁶⁰ Akibatnya, asset ekonomi masyarakat santri yang tidak sedikit, seperti saluran-saluran ekonomi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf belum dapat didayagunakan secara optimal. Harta wakaf misalnya, bias dipikirkan lebih jauh ke arah harta produktif yang bisa dikembangkan lewat saluran-saluran investasi yang sesuai sehingga bisa dioptimalkan kemanfaatannya bagi masyarakat. Hal ini jelas membutuhkan bekal wawasan ke-fiqh-an yang progresif.

⁶⁰ Abid Rohmanu, *Fiqh dan Tantangan Global* (dalam Aula, No. 05 Mei, 2003), 81.

Selain pendekatan yang sifatnya dogmatis, kajian fiqh yang dilakukan masyarakat santri lebih dititikberatkan pada kesalihan yang sifatnya individual (baca : ibadah *mahdlah*) dari pada kesalihan yang sifatnya sosial dan hal-hal yang bersifat ‘amaliyah dari pada pemikiran. Hal ini merupakan pengaruh dari paham sufisme yang menggelayuti pesantren yang bersenyawa dengan tradisi fiqh-nya. Untuk itu perlu disosialisasikan pemaknaan tashawuf yang lebih membumi (*worldly asceticism*), yakni sikap hidup kesufian tetapi tetap memperhatikan masalah dunia, atau kadang disebut dengan “sufi borjuis”.⁶¹

3. Unsur – unsur masyarakat santri

Masyarakat santri terdiri dari empat komponen,⁶² yaitu :

- 1) Kyai, ustad, dan ulama (di pesantren); Fungsi ke”ulama”an. dari Kyai dapat dilihat melalui 3 aspek, yakni:
 - a. Sebagai pemangku masjid dan madrasah
 - b. Sebagai pengajar dan pendidik
 - c. Sebagai ahli dan penguasa hukum Islam

Misi utama seorang kyai adalah sebagai pengajar dan pengajur dakwah Islam, dan mengambil peran lanjut orang tua. Ia sebagai guru sekaligus pemimpin rohaniah keagamaan serta bertanggung jawab untuk perkemangan kepribadian maupun kesehatan jasmaniah anak didiknya. Dengan otorita rohaniah

⁶¹ Mahmud Arif dalam “Tradisi Keilmuan dan Moralitas Pesantren”, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, No. 1 edisi Juli 2001), 102.

⁶² Horikosih dalam Arifin, *Membumikan Nilai-Nilai Pesantren* (Jakarta : elsas , 1993), 90.

kyai sekaligus menyatakan hukum dan aliran-alirannya, lewat kitab- kitab Islam klasik

- 2) Santri pondok pesantren; yaitu siswa yang belajar di pondok pesantren, baik santri musim maupun santri kalong.
- 3) Alumni santri dari suatu pondok pesantren, yaitu siswa santri yang telah keluar dari pendidikannya di pesantren, dan
- 4) Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pesantren.

4. Struktur Sosial Masyarakat Ekonomi Pesantren

Dalam masyarakat industri, pelapisan sosial berdasarkan kelas adalah hal yang tak terelakkan. Pelapisan tersebut didasarkan pada kontribusi seseorang atau kelompok pada market. Sebagaimana sosiologi non Marxis membagi kelas menjadi tiga; atas, menengah dan bawah sedang sosiologi Marxis menjadi dua; borjuis (kapitalis) dan proletar. Islam pada dasarnya tidak mengenal sistem kelas, kecuali yang bersifat eskatologis berdasar kualitas ketaqwaan.

Sosiologi Islam, menurut Kuntowijoyo, hanya mengakui kelas sebagai sebuah kepentingan (*class in itself*) dan menolak konsep pertentangan kelas (*class for it self*) sebagai-mana dalam sosiologi Marxis.⁶³

⁶³ Kuntowijoyo, *Identitas*, 44

Sebagai sebuah kolektifitas, masyarakat ekonomi pesantren mempunyai struktur. Masyarakat pesantren pada era industri mempunyai pilahan sosial yang berbeda dengan era agraris. Pada awalnya sub culture masyarakat pesantren hanya mengenal figur Kiai, santri dan masyarakat dan pihak lain yang mempunyai jalinan dengan kiai dan santri. Seiring berkumandangnya modernisasi, muncul kelompok-kelompok sosial yang sebelumnya tidak ada, seperti kelompok profesional, akademisi, politisi dan lainnya⁶⁴ yang pernah mengenyam pendidikan pesantren atau yang hanya mengafiliasikan atau mengklaim dirinya sebagai bagian dari masyarakat santri karena merasa mempunyai kesamaan budaya.

Di alam modern, banyak terlihat keluarga santri atau kiai justru menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah atau pendidikan tinggi umum bahkan pendidikan barat, asalkan mereka sudah dianggap punya bekal nilai keagamaan. Inilah sebagian cikal bakal terjadinya perubahan formasi sosial masyarakat pesantren. Implikasinya adalah semakin banyak elit terpelajar dari komunitas dan budaya pesantren berbasis pendidikan umum yang harus ditampung oleh lembaga-lembaga masyarakat pesantren kalau mereka tidak bisa memulai usaha dan aktualisasi secara mandiri. Kenyataannya, mereka belum terserap secara optimal, karena terbatasnya lembaga-lembaga masyarakat yang bisa menampung

⁶⁴ Gregory John Fealy, *Ijtihad Politik Ulama ; Sejarah NU 1952-1967 (Ulama and Politics in Indonesia a History of Nahdlatul Ulama 1952-1967)*, terj. Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtiar (Yogyakarta: LKiS, 2003), 26.

atau mungkin masih bercokolnya generasi tua yang enggan melibatkan partisipasi elit terpelajar baru.

Perubahan formasi sosial dengan hadirnya terutama kaum terpelajar dan profesional lambat laun akan membawa perubahan tata nilai masyarakat pesantren, termasuk dalam aktivitas ekonomi yang dikembangkannya. Era industri telah menawarkan tata nilai yang kontradiksi dengan alam pikiran masyarakat pesantren yang masih begitu setia dengan tradisi, keshalihan vertikal dan kharisma. Pada era industri ini, merupakan fase sejarah kemanusiaan, suatu fase tempat tradisi mulai dipertanyakan, hubungan sosial mulai disetarakan dan kharisma mulai dicairkan. Perubahan sosial yang begitu deras ini membuat bangunan-bangunan nilai komunal masyarakat pesantren mulai kehilangan elan vitalnya.

Upaya-upaya defensif dan protektif untuk mempertahankan tata nilai klasik sungguh sudah kehilangan momentum, sehingga yang diperlukan adalah upaya transformatif, yaitu mobilitas budaya yang bisa menyebabkan lembaga dan pranata sosial masyarakat pesantren menjadi tetap relevan. Era industrialisasi dan kemajuan masyarakat menumbuhkan lingkaran ketergantungan. Relasi dan ketergantungan antar elemen sosial semakin intensif disebabkan oleh semakin tingginya spesialisasi dan pembedaan kerja. Sebagian membutuhkan bagian yang lain (*mutual relationship*)

untuk survive. Karena-nya dibutuhkan kontrol dan koordinasi terhadap elemen-elemen sosial tersebut dalam wadah organisasi.

Begitu halnya dengan masyarakat pesantren, pluralitas spesialisasi kerja dan keahlian dari anggota masyarakat perlu dikelola dalam wadah organisasi-organisasi kerja, dan kiai atau ulama bukanlah aktor dominan dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut. Kenyataannya pada masyarakat tradisional, kiai sering kali sebagai pemilik usaha, manager usaha, figur politik dan sosial. Dalam lingkungan masyarakat ekonomi pesantren, kiai lebih banyak memainkan fungsi *exemplary center*, sebagai panutan dan penasehat bagi aktivitas perekonomian yang sehat, jujur dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Masyarakat benar-benar berhadapan dengan sistem, bukan otoritas. Penerapan system manajemen ilmiah dan profesionalisme sudah menjadi tuntutan. Manajemen ilmiah dan rasional akan menjadi counter terhadap tradisi masyarakat pesantren yang cenderung mengikuti kesadaran hati dari pada kesadaran akal. Manajemen tradisional yang biasanya “misterius”, dan tidak transparan dalam masyarakat pesantren yang bertumpu pada figur kharismatik dianggap tidak relevan lagi. Penerapan sistem manajemen ilmiah dan profesionalisme merupakan garapan kaum manajer dan kaum profesional.

Dengan bekal wawasan sosial dan etika bisnis yang diperoleh di bangku perkuliahan, dan basis nilai kepesantrenan yang adiluhung diharapkan akan membawa kultur baru dalam aktivitas perekonomian masyarakat pesantren, yakni terutama penumbuhan tanggung jawab sosial dan demokrasi sosial yang selaras dengan nilai keislaman. Mereka akan menyadari bahwa tanggung jawab sosial dan akuntabilitas sosial/ publik merupakan pengejawantahan dari nilai amanah (melaksanakan tanggung jawab). Sebuah kegiatan ekonomi harus mempunyai tanggung jawab yang bersifat publik/sosial. Hal ini selaras dengan teori akuntansi modern bahwa akuntansi bukanlah media pertanggungjawaban manajer kepada pemilik modal saja.

C. Kajian Umum tentang Ekonomi Islam

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*al maqasid al syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat

kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani.⁶⁵ Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا تَحْيِيكُمْ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.⁶⁶

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu⁶⁷, Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya⁶⁸ dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan “.

Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustasyfa* mengemukakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup akal, keturunan, dan harta. Segala tindakan yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebut merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan serta sesuai dengan kemaslahatan umum.⁶⁹

Secara umum tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut Allah telah membekali manusia dengan dua hal utama yaitu:⁷⁰ *manhaj al-hayat* “ sistem kehidupan” dan *wasilah al-hayat* “ sarana kehidupan”.⁷¹

⁶⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2010, 10-11

⁶⁶ Q.S. Al-Anfal (8) : 24.

⁶⁷ Maksudnya: menyeru kamu berperang untuk meninggikan kalimat Allah yang dapat membinasakan musuh serta menghidupkan Islam dan muslimin. juga berarti menyeru kamu kepada iman, petunjuk jihad dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

⁶⁸ Maksudnya: Allah-lah yang menguasai hati manusia

⁶⁹ *Ibid*, 11.

⁷⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta ; Gema Insani Press, 2001), 7.

⁷¹ al-Quran. 31 (*Luqman*) : 20

Manhaj al-hayat adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al Qur'an dan Sunah rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan (wajib) atau sebaliknya melakukan (*al- sunnah*), juga dalam bentuk larangan melakukan (haram) atau sebaliknya meninggalkan sesuatu (mubah dan makruh). Aturan aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. Hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (*al- hajah al dharuriyyah*).

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut sebagai *hayatan thayyibah*. Sebaliknya apabila manusia menolak untuk melaksanakan aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan dalam kehidupan seseorang, akan menimbulkan kemaksiyatan dan atau kehidupan yang sempit, serta kecelakaan di akhirat nanti.

Aturan-aturan itu juga diperlukan untuk mengelola *al wasikah al-hayat* atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan Allah swt untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wasikah al-hayah* ini dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan harta benda lainnya yang berguna dalam kehidupan.⁷² Konsepsi kepemilikan berlandaskan tauhid ini akan

⁷² al-Quran. 2 (*al-Baqarah*) : 29

menciptakan pelaku-pelaku ekonomi yang pada akhirnya memiliki keshalehan social untuk kesejahteraan bersama (kolektif) bukan orientasi individual.

1. Pengertian ekonomi Islam

Redaksi “ ekonomi ” merupakan kosa kata yang baru, dalam arti tidak dikenal pada masa awal Islam. Pada masa ini hanya mengenal istilah muamalah dalam arti luas, hubungan antarmanusia secara umum: ekonomi, rumah tangga dan lain-lain. Istilah "*iqtishad*" yang diartikan atau disepadankan dengan "ekonomi" merupakan kosa kata yang baru. Sehingga tidak ditemukan pada literatur keislaman klasik, fikih.⁷³ Kalau ditelusuri, istilah "*iqtishad*" muncul dari perkembangan pemikiran Muhammad Iqbal (1876-1938) salah seorang tokoh pembaruan Islam dari India. Pada tahun 1902 Iqbal menerbitkan buku yang berjudul "*Ilm al-Iqtishad*" (ilmu ekonomi).⁷⁴

Pemikiran tentang ekonomi Islam sebagai kajian teoritis baru mulai ramai dibicarakan pada awal dasawarsa 1970-an, walaupun pembahasan yang bersifat fikih sudah tampak sebelumnya sebagai bagian dari pemikiran hukum Islam. Dalam rangka itu, pembahasan tentang bunga bank yang dikaitkan dengan konsep riba merupakan bagian yang penting dan selalu disebutkan. Oleh karena itu, gagasan mengenai bank Islam berkembang terlebih dahulu dalam upaya

⁷³ Aminoto Sa'doellah, *Ekonomi "Tukang Semprit": Gagasan Ekonomi Islam versi Kitab Kuning*, Gerbang Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi, Vol.05,No.02,Oktober-Desember ; Surabaya, 1999) terutama sub: Lafaz tak Bertuan, 31-36.

⁷⁴ Timur Kuran, "*Politik Identitas Ekonomi Islam*", terj. Muhaimin Syamsuddin, Gerbang Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi, Vol.05,No.02,Oktober-Desember 1999, Surabaya), 103.

menerapkan prinsip ekonomi Islam.⁷⁵ Tampaknya pemikiran ekonomi Islam, di Indonesia khususnya, belum bergerak jauh dari tema perbankan (lembaga keuangan lainnya). Dengan demikian pemikiran ekonomi Islam masih menunggu karya kreatif, ijtihad, para pendukungnya untuk mengembangkannya.

2. Azas dan Prinsip Ekonomi Islam

Dalam tataran paradigma, para proponent ekonomi Islam mayoritas menyepakati bahwa religiusitas dan orientasi dunia dan akhirat adalah prinsip dasar dalam bangunan ekonomi Islam.⁷⁶ Kesepahaman akan pilar utama atau pondasi filosofis dari sistem ekonomi tersebut adalah *al-tauhid*, *khilafah*, *ibadah*, dan *takaful*.⁷⁷ Khurshid Ahmad menambahkan: *rububiyah* dan *tazkiyyah*,⁷⁸ serta *mas' uliyyah (accountability)*.⁷⁹

Perbedaan kemudian terjadi di kalangan ekonom muslim ketika aplikasi konsepsi ekonomi Islam dalam tiga madzhab dalam ekonomi Islam seperti mazhab Baqir al-Sadr, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif-kritis.⁸⁰

⁷⁵ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jld.6, 2007, 399

⁷⁶ Adiwarman Karim, "*Ekonomi Mikro Islami*", (Jakarta : The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002), 13, lihat juga Adiwarman Karim, "*Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*", (Jakarta : The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002), 195-197, dan lihat juga M.B. Hendrie Anto, "*Pengantar Ekonomika Mikro Islami*", (Jogjakarta : Ekonisia, 2003), 89-93.

⁷⁷ Mohamed Aslam Haneef, "*Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*" (Kuala Lumpur : Ikraq, 1995), 2.

⁷⁸ Khurshid Ahmad, "*Economic Development in an Islamic Framework*", dalam Khurshid Ahmad (ed.), "*Studies in Islamic Economics*", (Leicester : The Islamic Foundation, 1980), 178-179.

⁷⁹ M. Akhyar Adnan, "An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks: The Cases of Bank Islam Malaysia Berhad and Bank Muamalat Indonesia", PhD Thesis (Australia : University of Wollongong, 1996), h.136-137, lihat juga QS al-Baqarah(2), 282-283.

⁸⁰ Karim, "*Ekonomi Islam*", 195-197.

Sedangkan prinsip sistem ekonomi Islam ada 2 (dua),⁸¹ yaitu:

- a. Pertama, Prinsip umum, yaitu Aqidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran (*al-qa'idah al fikriyah*) bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Aqidah Islamiyah di sini dipahami bukan sekedar sebagai Aqidah Ruhiah (aqidah spiritual), yakni aqidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai Aqidah Siyasiyah (aqidah politis), yakni aqidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi.
- b. Kedua, prinsip khusus (cabang), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam Syariah Islam yang lahir dari Aqidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Prinsip khusus ini terdiri dari tiga asas (pilar), yaitu: (1) kepemilikan (*al-milkiyah*) sesuai syariah, (2) pemanfaatan kepemilikan (*tasharruf fi al-milkiyah*) sesuai syariah, dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi' al-tsarwah baina al-nas*), melalui mekanisme syariah. Aplikasi dari tiga prinsip ini menjadi tiang pancang bagi kekuatan bangunan sistem ekonomi Islam setelah pondasi atau azas-azasnya telah dibangun dengan benar.

⁸¹ Syafi'i Buaran, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Pekalongan : PPMAB, 2010), 4.

3. Pendekatan Ekonomi Islam Kontemporer

Menurut Prof. Volker Nienhaus,⁸² dalam tulisannya “*Islamic Economics: Policy Between Pragmatism and Utopia*”, ada empat pendekatan utama dalam kajian mengenai ekonomi Islam selama ini.

- a. Pendekatan *Pragmatis*; kecenderungan ini ditandai dengan penolakan ideologi-ideologi ekonomi yang diikuti dengan upaya melakukan sintesis atau ekleksi, yaitu mencampur berbagai gagasan dan teori yang dianggap paling praktis untuk dilaksanakan. Menurut Nienhaus kecenderungan inilah yang banyak diambil.
- b. Pendekatan *resitatif*; pendekatan yang mengacu pada teks ajaran Islam, pendekatan ini mengacu pada hukum fikih, teologi, etika ekonomi.
- c. Pendekatan *utopian*. Utopia adalah gambaran mengenai dunia yang kita inginkan. Pendekatan ini dikembangkan dengan merumuskan model manusia, misalnya *homo economicus*, atau manusia altruistis. Selanjutnya dikembangkan model masyarakat yang dicita-citakan: “*Baldah al-Thayyibah wa Rabbun Ghafur*”.
- d. Pendekatan *adaptif*; berusaha melakukan penyesuaian diri berdasarkan kondisi setempat dan sejarah masing-masing umat Islam, seperti gagasan sosialisme Islam; sosialisme kerakyatan; sosialisme demokrasi.

⁸² Dawam Rahardjo, *Wacana Ekonomi Islam Kontemporer*, dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), xixvi.

Di sisi lain, Muchtar Ahmad menjelaskan kajian ekonomi Islam selama ini dapat dikategorikan menjadi empat corak.⁸³

- a. Kajian ekonomi Islam dalam lingkup normatif, dalam arti upaya menjelaskan dasar-dasar filosofis atau normatif suatu kajian ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Islam, menurut ajaran baku dalam al-Qur'an dan hadis.
- b. Kajian ekonomi Islam hasil pemikiran atau penyelidikan para fukaha, pakar ekonomi, sosiolog, dan sebagainya seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Abu Yusuf, Umer Chapra dan sebagainya yang dilakukan secara kritis, baik melalui pemeriksaan teori dan tesis yang dikemukakan maupun melalui pengujiannya terhadap perilaku ekonomi muslim.
- c. Kajian perbandingan antara perilaku ekonomi muslim dengan konsep sistem ekonomi Islam yang teoritis. Atau menghadapkan perilaku ekonomi muslim kepada nilai-nilai Islam.
- d. Kajian perbandingan antara konsep sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis serta perkembangan ekonomi kontemporer (gejala perkembangan sistem ekonomi dunia).

Perbedaan cara pandang dan aktualisasi ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan. Kondisi ini dikarenakan perbedaan pemaknaan Islam yang disandarkan pada konteks ruang dan waktu akan

⁸³ Muchtar Ahmad, "*Kajian Ekonomi dan Nilai Islami*", Jurnal : *Ulumul Qur'an*, Vol. II. No.9. (1991), 9.

menghasilkan paradigma berfikir yang beragam. Persepsi dan sikap masyarakat santri dalam memandang perbankan syariah juga akan berbeda tergantung pada pemilihan cara pandang dan aktualisasi ekonomi Islam dalam kehidupan disamping pemahaman mereka terhadap dunia perbankan baik dalam skala makro maupun mikro.

D. Kajian Umum tentang Bank Syariah

Dalam al-Qur'an, istilah bank tidak pernah disebutkan secara eksplisit. Tetapi menurut Arifin⁸⁴, jika yang dimaksud merujuk pada sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, shodaqoh, *ghanimah*, *bai'*, dan sebagainya, atau segala sesuatu yang memiliki fungsi atau peran tertentu yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi.

Sedangkan dilihat dari sisi akhlak, al-Qur'an juga menyebutkan sebuah konsep yang secara eksplisit disebutkan dalam bentuk kisah maupun perintah. Konsep *accountability* merupakan contoh kongkrit yang tertera dalam beberapa ayat, yakni:⁸⁵

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

⁸⁴ Arifin, *Dasar*, 20.

⁸⁵ QS al-Baqarah(2):282-283

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِمْ مَقْبُوضَةً ۗ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ



Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah⁸⁶ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang⁸⁷ (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya,

⁸⁶ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

⁸⁷ barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam konteks perbankan, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸⁸ Dalam pengertian ini, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank Islam atau bank syari'ah secara teknis mempunyai persamaan pengertian. Menurut Karnaen A. Perwaatmadja⁸⁹, bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank yang tata cara dan operasinya menggunakan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur penting yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.

⁸⁸ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁸⁹ Karnaen A. Perwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting) *Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah*, cet. 1, (Jakarta : Renaisan, 2005), 18.

Sedangkan Warkum Sumitro⁹⁰, mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadits. Dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan al-Qur'an dan hadits.

Senada dengan pengertian di atas, Amin Azis juga berpendapat bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syari'ah harus sesuai dengan tuntunan al-Qur'an maupun hadits, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syari'ah Islam.⁹¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam atau bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Di mana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

⁹⁰ *Ibid*, 19.

⁹¹ *Ibid*, 21.

2. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Nama bank syariah merupakan istilah khas dari industri perbankan berbasis Islam yang hanya ada di Indonesia.⁹² Istilah syariah pun menjadi *trademark* tersendiri bagi istilah ekonomi di negara ini. Pemilihan nama ini didasarkan pada sejarah labelisasi agama Islam dalam negara. Keberadaan lembaga ini menjadi sebuah alternatif dalam menciptakan sistem keuangan bebas riba yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional.

Bank Muamalat Indonesia atau disingkat BMI adalah bank Islam pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip bagi hasil dan bebas bunga. Bank ini didirikan pada tanggal 3 Nopember 1991 dengan modal awal Rp. 106.126.382.000,00. Aktifitas bank ini terakomodasi dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil dengan pembahasan yang sangat kecil. Tetapi pada tahap perkembangannya bank ini telah memiliki sebanyak 45 outlet yang tersebar di kota-kota di dalam dan luar Jawa pada September 1999.

Momentum kebangkitan bank Syariah dimulai ketika terjadi krisis moneter 1998, dimana bank-bank konvensional mengalami *negative spread*. Banyak terjadi kredit macet dikarenakan oleh situasi ini.⁹³ Kekuatan sistem bagi hasil menjadi alat legitimasi para

⁹² Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, (Jakarta : elsas, 2008), 67.

⁹³ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta : gema Insani Press Cet. Pertama, 2001), 12.

bankir syariah untuk memberikan justifikasi akan keunggulan bank syariah.

3. Azas, Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁹⁴ Ketiga asas ini menjadi landasan operasional bagi aktifitas bank syariah.

Adapun fungsi bank Syariah atau Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut⁹⁵ :

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁹⁴ UU No. 21 2008 *Tentang Perbankan Syariah* Bab II Pasal 2

⁹⁵ UU No. 21 2008 *Tentang Perbankan Syariah* Bab II Pasal 4

Dalam konteks Indonesia, perbankan syariah memiliki tujuan-tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁹⁶ Tujuan yang ditetapkan oleh bank syariah tetap dalam kerangka negara Indonesia yang memiliki dasar pancasila dengan Bank Indonesia sebagai induk perbankan nasional. Hal ini menunjukkan akan universalitas Islam dalam banyak aspek kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia.

⁹⁶ UU No. 21 2008 *Tentang Perbankan Syariah* Bab II Pasal 3